

Efektivitas Penggunaan QRIS Dalam Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)

Achmad Safi'i, Arisyahidin, Sonny Subroto Maheri Laksono

Magister Manajemen, Universitas Islam Kediri

email: latief.sani@gmail.com

Abstract

This study aims to analyze the effectiveness of QRIS use in Land and Building Tax (PBB) payments and its impact on achieving revenue targets in Kediri Regency. The research methods used included observation, interviews, and analysis of PBB transaction data through the QRIS system. The results show that the use of QRIS has proven effective in facilitating the public's PBB payments. QRIS enables transactions through various digital channels, speeds up the payment process, reduces queues at the counter, and improves the accuracy and transparency of transaction recording through integration with the Kediri Regency Bapenda tax information system. Although there were technical obstacles such as failed transactions or expired QRIS, these problems were overcome through data reconciliation, coordination with banks, and taxpayer education. In addition, the implementation of QRIS has had a positive impact on achieving PBB revenue targets. This system supports real-time monitoring, minimizes recording errors, improves administrative efficiency, and encourages taxpayer compliance. Digitizing payments through QRIS also strengthens transparency and bookkeeping accuracy, thus assisting the Kediri Regency Bapenda in evaluating revenue performance. The findings of this study confirm that QRIS is an effective solution for improving the convenience of tax services and supporting the optimization of regional revenue.

Keywords: QRIS, Land and Building Tax, Effectiveness, Regional Revenue, Payment Digitalization

A. Latar Belakang Teoritis

Sebagai implementasi dari kebijakan otonomi daerah setiap daerah mempunyai kewenangan untuk mengelola keuangan masing-masing baik berupa pendapatan maupun belanja daerah. Peralihan kewenangan dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah pada era otonomi daerah mempunyai konsekuensi bahwa pemerintah daerah harus mampu menjalankan aktivitas pembangunan dengan baik dan harus memperhatikan pemerataan berkeadilan dengan menggunakan potensi daerah (Sari et al., 2021). Berdasarkan Undang-Undang No. 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, disebutkan bahwa pendapatan pemerintah daerah terdiri dari Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Perimbangan dan lain-lain pendapatan yang sah.

Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan salah satu komponen penting dalam struktur keuangan daerah yang mencerminkan kemampuan daerah untuk membiayai berbagai kebutuhan pembangunan secara mandiri (Rahman & Restiatun, 2023; Nalle et al., 2021; Andjarwati et al., 2021). Pendapatan asli daerah adalah

semua penerimaan daerah yang berasal dari sumber ekonomi asli daerah (Rizqy Ramadhan, 2019; Irwan Moridu, 2021; Bustani et al., 2022). Komponen PAD di Kabupaten Kediri bersumber dari pajak daerah dan retribusi daerah berupa Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB), Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, Pajak Parkir, Pajak Air Tanah, Pajak Reklame, Pajak Air Tanah dan Pajak Mineral bukan logam dan batuan, serta untuk dari sumber penerimaan retribusi terdiri dari Retribusi Pariwisata, Retribusi parkir tepi jalan umum dan sebagainya.

Setiap daerah berupaya untuk meningkatkan pendapatan PAD dengan berbagai cara seperti : ekstensifikasi, intensifikasi. Salah satu upaya yang dilakukan oleh pemerintah kabupaten Kediri adalah dengan meningkatkan efektivitas penerimaan PBB melalui intensifikasi dalam memberikan kemudahan bagi masyarakat untuk pembayaran PBB.

Pembayaran PBB di Kabupaten Kediri bisa dilakukan melalui berbagai macam cara baik melalui pembayaran tunai maupun pembayaran secara online/ digital, untuk

pembayaran tunai bisa melalui petugas pungut di desa atau langsung ke teller Bank (Bank Jatim, Bank BNI dan Bank Mandiri), untuk pembayaran secara digital bisa melalui aplikasi M Banking (Bank Jatim, Bank BNI dan Bank Mandiri), yang tentunya belum bisa mengakomodir pembayaran dari Bank-bank lain seperti BCA dan sebagainya, serta belum bisa mengakomodir pembayaran melalui uang digital.

Mulai tahun 2022 dalam rangka meningkatkan perluasan channel pembayaran tersebut maka Bapenda Kabupaten Kediri mulai mengembangkan sistem pembayaran Qris yang bisa menerima seluruh sistem pembayaran tidak hanya dari Bank Jatim, Bank BNI dan Mandiri. Sehingga kendala pembayaran dari bermacam-macam bank sudah bisa diatas dengan adanya sitem QRIS ini. Selai itu melalui Qris juga dalam menerima pembayaran melalui uang digital seperti OVO, Gopay, Shopee Pay, Dana, dan berbagai uang digital lainnya melalui fitur scan Qris..

Wajib pajak yang ingin membayarkan PBB cukup memindai Qris yang muncul dari web e-sppt.kedirikab.go.id dan memasukkan NOP (Nomor Objek Pajak) PBB melalui web tersebut.

Financial Technology (Fintech) merupakan inovasi terbaru dalam sistem keuangan yang menggabungkan teknologi dengan layanan keuangan. Kehadiran fintech di Indonesia telah membawa banyak inovasi, terutama dalam aplikasi pengelolaan keuangan yang memudahkan proses transaksi digital. Saat ini, transaksi non-tunai menjadi tren utama, didorong oleh kemudahan, kecepatan, dan keamanan yang ditawarkan oleh fintech.

Sejak diperkenalkan di Indonesia pada tahun 2007, fintech telah diterapkan di berbagai platform layanan ekonomi digital. Fintech telah menjangkau berbagai sektor, mulai dari layanan pembayaran dan nasihat keuangan, hingga investasi ritel, *crowdfunding*, remitansi, dan studi keuangan. Pertumbuhan

fintech di Indonesia menunjukkan transisi populasi dari sistem ekonomi tradisional kepenggunaan layanan digital. Transformasi masyarakat didasarkan pada kecepatan dan kemudahan fintech dalam mengakses berbagai kebutuhan yang berkaitan dengan sistem keuangan. (Safitri, 2021).

Digital payment atau pembayaran digital merupakan sebuah alternatif pembayaran non tunai di Indonesia yang tidak hanya berbentuk kartu. Namun ada yang tersimpan dalam sebuah smartphone dengan istilah mobile payment, dalam bentuk sms, internet banking, mobile banking dan dompet elektronik. Saat ini digital payment atau pembayaran melalui media elektronik di Indonesia sangat berkembang pesat dan melonjak popularitasnya.

Adanya digital payment seseorang memperoleh manfaat yaitu memberikan transaksi yang cepat dan mudah sehingga seseorang mendapatkan kenyamanan dalam metode pembayaran dengan menggunakan digital payment. Beberapa aplikasi pembayaran digital yang populer digunakan di Indonesia saat ini, seperti OVO, DANA, GoPay, Link Aja, M. Banking dan Shopee Pay.

Penggunaan uang elektronik menjadi pendukung agenda Bank Indonesia untuk menciptakan masyarakat dalam pembayaran tanpa uang tunai (*cashless society*) atau gerakan non-tunai di Indonesia didukung dengan Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/12/PBI/2009 dan Nomor 16/8/PBI/2014. Aplikasi pembayaran digital, dompet elektronik, dan transfer uang online sekarang menjadi bagian penting dari kehidupan sehari-hari, terutama di kalangan generasi muda dan paham teknologi (Dita, 2023)

Evolusi teknologi finansial atau fintech telah membawa perubahan signifikan tentang bagaimana cara masyarakat melakukan transaksi. Salah satu inovasi yang paling menonjol adalah *Quick Response Code Indonesian Standard* (QRIS), standar pengkodean QR nasional untuk transaksi

digital, yang diperkenalkan oleh Bank Indonesia pada 17 Agustus 2019. QRIS memungkinkan transaksi dilakukan dari berbagai platform pembayaran digital hanya dengan satu kode QR. QRIS adalah penyatuan berbagai jenis kode QR dari berbagai Penyelenggara Jasa Sistem Pembayaran (PJSP) melalui kode QR. QRIS memungkinkan transaksi keuangan yang cepat, aman, dan efisien, sehingga menjadi pilihan yang cukup baik bagi masyarakat dalam melakukan pembayaran.

Menganalisis dan memahami hambatan serta pendorong dalam penggunaan QRIS, pihak pemerintah dapat merancang program sosialisasi dan edukasi yang lebih efektif. Selain itu, dukungan infrastruktur dan kebijakan yang tepat juga diperlukan untuk menciptakan ekosistem pembayaran yang kondusif. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran yang komprehensif tentang penggunaan Fintech QRIS dalam pembayaran PBB di Kabupaten Kediri.

Berdasarkan hasil observasi dan uraian latar belakang di atas diperlukan penelitian lebih lanjut dan penulis tertarik melakukan penelitian dengan judul “**Efektivitas Penggunaan QRIS Dalam Pembayaran Pajak Bumi dan bangunan (PBB) Di Kabupaten Kediri.**

Pendapatan Asli Daerah

Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan salah satu indikator penting dalam mengukur tingkat kemandirian fiskal suatu daerah. Menurut Montolalu (2017), Pendapatan Asli Daerah adalah pendapatan yang diperoleh daerah dan dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Definisi ini menegaskan bahwa PAD bersumber dari kewenangan pemerintah daerah sendiri, sehingga mencerminkan kemampuan daerah untuk membiayai

kebutuhan dan program pembangunan tanpa ketergantungan penuh pada dana transfer dari pemerintah pusat.

Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)

Menurut Sari (2013:34) pajak adalah iuran masyarakat kepada negara yang sifatnya dapat dipaksakan, yang terutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan perundang-undangan dengan tidak mendapat prestasi kembali yang langsung dapat ditunjuk

Financial Technology (Fintech)

Financial Technology (Fintech) merupakan pengembangan baru industri jasa keuangan berupa konsep yang mengadaptasi perkembangan teknologi yang dipadukan dengan bidang finansial yang di dalamnya terdapat inovasi dengan harapan bisa menghadirkan proses transaksi keuangan yang lebih efektif, efisien, aman, serta modern (Marginingsih, 2019).

QRIS (*Quick Response Code Indonesian Standard*)

Kode Respon Cepat Standar Indonesia (QRIS) merupakan integrasi berbagai jenis kode QR dari berbagai Penyelenggara Jasa Sistem Pembayaran (PJSP). Pengembangan QRIS dilakukan secara kolaboratif oleh Asosiasi Sistem Pembayaran Indonesia (ASPI) dan Bank Indonesia dengan tujuan untuk mempermudah, mempercepat, serta menjaga keamanan dalam melakukan transaksi melalui kode QR (Dita Riyanto, 2023).

Kebijakan dalam Penggunaan QRIS

Era digital yang berkembang pesat, QRIS (*Quick Response Code Indonesian Standard*) telah menjadi inovasi yang sangat penting dalam dunia transaksi keuangan. Untuk mengoptimalkan penggunaannya, diperlukan adanya regulasi yang jelas dan standar yang mencakup aspek keamanan, privasi,

interoperabilitas, serta pembagian tanggung jawab yang tepat. Kerja sama yang erat antara pemerintah, regulator, dan pelaku industri menjadi kunci dalam implementasi QRIS.

Proposi Penelitian

Implementasi pembayaran PBB melalui QRIS di Kabupaten Kediri berpotensi mempermudah proses pembayaran dan meningkatkan pencapaian target pendapatan, meskipun efektivitasnya masih dipengaruhi oleh tingkat adopsi masyarakat, sosialisasi, dan kesiapan infrastruktur digital.

B. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif yang bertujuan untuk memahami secara mendalam efektivitas penggunaan QRIS dalam pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) di Kabupaten Kediri. Sumber data penelitian terdiri dari data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh melalui wawancara dengan petugas pajak dan wajib pajak yang menggunakan QRIS sebagai media pembayaran. Sedangkan data sekunder diperoleh melalui dokumentasi berupa laporan resmi, peraturan terkait, dan catatan administrasi pembayaran PBB. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan mengkombinasikan wawancara mendalam untuk mendapatkan perspektif pengguna dan petugas, serta dokumentasi untuk memverifikasi dan melengkapi informasi terkait penggunaan QRIS. Data yang diperoleh kemudian dianalisis secara kualitatif dengan pendekatan deskriptif untuk menjelaskan bagaimana implementasi QRIS dalam pembayaran PBB serta faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitasnya. Hasil penelitian diharapkan dapat memberikan gambaran yang komprehensif mengenai keberhasilan penggunaan QRIS dalam meningkatkan efisiensi dan kenyamanan pembayaran PBB di Kabupaten Kediri.

C. Hasil Dan Pembahasan

Implementasi Sistem Pembayaran PBB di Kabupaten Kediri

Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) merupakan salah satu sumber pendapatan asli daerah yang penting bagi Kabupaten Kediri. Untuk meningkatkan efisiensi, transparansi, dan kemudahan pembayaran, pemerintah daerah telah mengimplementasikan sistem pembayaran digital melalui QRIS. Sistem ini memungkinkan wajib pajak membayar PBB secara langsung menggunakan aplikasi perbankan atau dompet digital tanpa harus datang ke kantor pajak atau bank, sehingga mempercepat proses administrasi dan mengurangi antrean. Pelaksanaan pembayaran melibatkan beberapa Organisasi Perangkat Daerah (OPD), terutama Badan Pendapatan Daerah (Bapenda), dengan mekanisme pembayaran melalui scan QRIS yang secara otomatis mencatat transaksi dan memperbarui data penerimaan pajak secara real-time.

Selain mempermudah wajib pajak, implementasi QRIS juga mendukung pencapaian target pendapatan daerah. Data menunjukkan adanya peningkatan jumlah transaksi PBB setelah sistem diterapkan, meskipun terdapat kendala seperti pemahaman masyarakat terhadap teknologi digital, jaringan internet yang belum merata, dan kebiasaan pembayaran konvensional. Pemerintah Kabupaten Kediri melakukan berbagai upaya untuk meningkatkan efektivitas sistem, termasuk sosialisasi, panduan pembayaran digital, serta kerja sama dengan perbankan dan penyedia QRIS. Penerapan sistem ini merupakan inovasi strategis yang menggabungkan teknologi digital dengan pelayanan publik, sekaligus meningkatkan pendapatan asli daerah secara lebih efisien, transparan, dan modern.

Hasil Penelitian / Data Lapangan

Penelitian ini menyoroti implementasi QRIS dalam pembayaran Pajak Bumi dan

Bangunan (PBB) di Kabupaten Kediri, yang bertujuan mempermudah akses wajib pajak sekaligus meningkatkan efisiensi dan akurasi pencatatan penerimaan. Wawancara dengan Kepala Bapenda, menegaskan bahwa QRIS memudahkan pembayaran PBB melalui berbagai kanal digital, mengurangi kebutuhan wajib pajak untuk datang ke kantor, dan mendukung program TP2DD Kabupaten Kediri. Kepala Bapenda juga menekankan efektivitas sistem secara umum meskipun terdapat kendala minor berupa transaksi gagal flagging, yang ditangani melalui koordinasi internal.

Perspektif Kabid Perencanaan dan Pengendalian, memperkuat temuan ini dengan menjelaskan proses perencanaan dan koordinasi dengan vendor aplikasi serta pihak perbankan untuk memastikan integrasi QRIS berjalan lancar. Ia menekankan indikator keberhasilan sistem, termasuk jumlah penerimaan dari pengguna QRIS dan penanganan keluhan gagal flagging, serta inovasi tambahan seperti pemberian hadiah bagi pengguna untuk meningkatkan partisipasi masyarakat.

Dari sisi pencatatan, Kasubid Pembukuan, menekankan bahwa QRIS secara otomatis mencatat transaksi melalui integrasi dengan rekening perantara Bank Jatim, meminimalkan human error dan memungkinkan real-time reporting. Namun, beberapa transaksi tidak langsung ter-flagging, sehingga memerlukan mekanisme rekonsiliasi untuk menjaga akurasi laporan. Hal ini menunjukkan bahwa keberhasilan QRIS tidak hanya tergantung pada kemudahan pembayaran, tetapi juga pada pengendalian dan pemantauan data yang konsisten.

Staf IT, menambahkan perspektif teknis, menjelaskan integrasi QRIS dengan sistem informasi pajak melalui API, sinkronisasi real-time dengan NOP, serta standar keamanan data melalui enkripsi dan kontrol akses berbasis peran. Ia juga menekankan pentingnya pelatihan staf dan

edukasi frontliner untuk mendukung kelancaran penggunaan QRIS oleh wajib pajak.

Dari sisi pelayanan langsung, Staf Bagian Pelayanan, mengungkapkan bahwa masyarakat merespons positif sistem ini karena mudah digunakan, dan staf pelayanan selalu siap membantu menangani kendala teknis seperti gagal flagging. Hal ini menunjukkan bahwa keberhasilan implementasi QRIS tidak hanya bergantung pada teknologi dan integrasi sistem, tetapi juga pada dukungan pelayanan serta literasi digital masyarakat.

Secara keseluruhan, penelitian ini menunjukkan bahwa penerapan QRIS di Kabupaten Kediri berjalan efektif, meningkatkan kemudahan dan efisiensi pembayaran PBB, mempercepat pencatatan penerimaan, dan mendukung keterlibatan aktif masyarakat. Meskipun terdapat kendala minor terkait sinkronisasi dan flagging transaksi, mekanisme penanganan teknis dan koordinasi antarunit telah meminimalkan dampaknya, menjadikan QRIS sebagai inovasi strategis dalam pelayanan publik dan pengelolaan pendapatan daerah.

Analisis Data dan Pembahasan

Berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala Bapenda Kabupaten Kediri, Kabid Perencanaan dan Pengendalian, Kasubid Pembukuan, staf IT, dan staf pelayanan, implementasi QRIS dalam pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) menunjukkan kemajuan signifikan dalam kemudahan dan efisiensi pembayaran. Kepala Bapenda menegaskan bahwa QRIS mempermudah pembayaran PBB melalui berbagai kanal, didukung penuh oleh Pemerintah Daerah sebagai bagian dari program TP2DD, serta efektif meningkatkan akses masyarakat. Meskipun terdapat kendala minor berupa transaksi gagal flagging, hal ini sedang ditangani, dan ke depan sistem akan dikembangkan melalui perluasan channel pembayaran termasuk e-commerce.

Dari sisi perencanaan dan pengendalian, Kabid Perencanaan dan Pengendalian menjelaskan bahwa keberhasilan implementasi QRIS bergantung pada koordinasi dengan vendor aplikasi dan pihak perbankan serta penyiapan aplikasi e-SPPJ. Evaluasi efektivitas sistem mencakup jumlah penerimaan dari pengguna QRIS, keluhan gagal flagging, dan penanganannya. Strategi tambahan seperti pemberian insentif atau undian diusulkan untuk meningkatkan partisipasi masyarakat. Tantangan utama tetap transaksi gagal flagging yang memerlukan koordinasi antara tim IT dan bank agar pencatatan tetap akurat.

Kasubid Pembukuan menekankan pentingnya pencatatan dan akurasi data, di mana transaksi QRIS tercatat melalui rekening perantara Bank Jatim. Meski sistem meningkatkan efisiensi, beberapa transaksi tidak langsung terflagging, sehingga diperlukan monitoring dan rekonsiliasi untuk menjaga validitas laporan keuangan. Staf IT menambahkan bahwa integrasi sistem dilakukan melalui API, pencatatan real-time dengan NOP, dan keamanan data dijaga melalui enkripsi, firewall, audit log, serta kontrol akses berbasis peran. Kendala teknis minor seperti gangguan jaringan atau literasi wajib pajak ditangani melalui sistem retry, rekonsiliasi, dan edukasi masyarakat, sehingga sistem tetap stabil dan efektif.

Perspektif staf pelayanan menunjukkan bahwa masyarakat merespons positif penggunaan QRIS karena kemudahan dan kecepatan layanan, dengan petugas hanya membantu kasus gagal flagging. Secara keseluruhan, penerapan QRIS telah meningkatkan kemudahan dan efisiensi pembayaran PBB, mempercepat pencatatan dan realisasi pendapatan, serta meminimalkan human error. Kendala minor yang masih ada dapat diatasi melalui monitoring, rekonsiliasi data, edukasi masyarakat, dan strategi insentif, konsisten dengan temuan penelitian sebelumnya bahwa QRIS mendukung

kepatuhan wajib pajak dan efisiensi administrasi.

Interpretasi Hasil

Berdasarkan rumusan masalah penelitian, yaitu (1) bagaimana implementasi pembayaran PBB dengan menggunakan QRIS oleh masyarakat di Kabupaten Kediri, dan (2) bagaimana dampak penerapan QRIS terhadap pencapaian target pendapatan PBB, maka pembahasan hasil penelitian dapat dijelaskan sebagai berikut:

Implementasi Pembayaran PBB dengan QRIS oleh Masyarakat di Kabupaten Kediri

Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi QRIS telah diterapkan secara menyeluruh pada sistem pembayaran PBB di Kabupaten Kediri. Kepala Bapenda menyatakan bahwa QRIS memudahkan masyarakat dalam membayar PBB melalui berbagai channel pembayaran, dan hal ini juga didukung oleh pihak Pemerintah Daerah yang melihat kemudahan dan efisiensi sebagai salah satu prioritas. Informasi ini diperkuat oleh Kabid Perencanaan dan Pengendalian yang menjelaskan bahwa sistem QRIS terintegrasi dengan aplikasi e-SPPJ, memungkinkan transaksi tercatat secara otomatis. Staf IT menambahkan bahwa integrasi sistem melalui API memastikan setiap transaksi QRIS terhubung dengan Nomor Objek Pajak (NOP), sehingga meminimalkan human error dan meningkatkan akurasi data. Dari sisi pelayanan, staf menekankan bahwa masyarakat mudah memahami penggunaan QRIS, dan staf hanya perlu membantu ketika terjadi transaksi gagal flagging.

Berdasarkan paparan tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa implementasi QRIS telah berjalan efektif dan diterima baik oleh masyarakat, meskipun masih terdapat kendala minor seperti transaksi gagal flagging yang memerlukan penanganan teknis lebih lanjut.

Dampak Penerapan QRIS terhadap Pencapaian Target Pendapatan PBB

Penggunaan QRIS terbukti mempercepat pencatatan dan realisasi pendapatan PBB. Kepala Bapenda menyatakan bahwa penggunaan QRIS mempermudah monitoring penerimaan pajak, sedangkan Kabid Perencanaan dan Pengendalian menekankan bahwa indikator keberhasilan dilihat dari jumlah penerimaan PBB melalui QRIS dan keluhan gagal flagging yang ditangani. Kasubid Pembukuan menambahkan bahwa meskipun ada beberapa transaksi yang tidak langsung terflagging ke aplikasi, sistem QRIS tetap membantu meningkatkan efisiensi pembukuan dan akurasi laporan keuangan. Staf IT menekankan bahwa sistem QRIS berjalan real-time dan aman, sehingga pencapaian target pendapatan lebih terjamin.

Berdasarkan uraian diatas, maka dapat disimpulkan bahwa penerapan QRIS memiliki dampak positif terhadap pencapaian target pendapatan PBB Kabupaten Kediri, baik dari sisi percepatan penerimaan, akurasi data, maupun efisiensi administrasi. Kendala yang ada, seperti transaksi gagal flagging atau keterlambatan sinkronisasi minor, dapat diminimalisir melalui rekonsiliasi data, monitoring sistem, dan edukasi wajib pajak. Kesimpulan dari kedua rumusan masalah ini yaitu implementasi QRIS di Kabupaten Kediri efektif dan diterima dengan baik oleh masyarakat, serta memberikan dampak positif terhadap pencapaian target pendapatan PBB. Hal ini menunjukkan bahwa penggunaan sistem digitalisasi pembayaran pajak melalui QRIS merupakan salah satu strategi yang tepat untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak, mempercepat pencatatan transaksi, dan mendukung transparansi serta akurasi laporan keuangan daerah.

D. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis yang telah dilakukan, dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

- 1) Efektivitas penggunaan QRIS dalam pembayaran PBB oleh masyarakat di Kabupaten Kediri

Penggunaan QRIS terbukti efektif dalam mempermudah masyarakat melakukan pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan. QRIS memudahkan transaksi karena dapat diakses melalui berbagai kanal digital, mempercepat proses pembayaran, dan mengurangi antrean di loket. Integrasi sistem QRIS dengan sistem informasi pajak Bapenda Kabupaten Kediri melalui API membuat pencatatan transaksi lebih akurat dan transparan. Meskipun terdapat kendala teknis seperti transaksi gagal flagging dan beberapa kasus QRIS expired, hal ini dapat diatasi melalui rekonsiliasi data, koordinasi dengan bank, dan edukasi kepada wajib pajak. Secara keseluruhan, masyarakat merasa terbantu dan puas dengan kemudahan penggunaan QRIS dalam pembayaran PBB.

- 2) Dampak penggunaan QRIS terhadap pencapaian target pendapatan PBB di Kabupaten Kediri

Penerapan QRIS berdampak positif terhadap pencapaian target pendapatan PBB. Sistem ini memungkinkan pengawasan real-time, meminimalisir kesalahan pencatatan, dan meningkatkan efisiensi administrasi pendapatan daerah. Data menunjukkan bahwa integrasi QRIS dapat mendukung peningkatan kepatuhan wajib pajak dan mempercepat realisasi penerimaan PBB. Selain itu, digitalisasi pembayaran melalui QRIS memperkuat transparansi dan akurasi pembukuan, sehingga membantu Bapenda dalam mengevaluasi kinerja pendapatan secara lebih efektif.

F. Referensi

Arfanuddin, A., Masrullah, & Darwin, K. (2024). Pengaruh Pajak Bumi dan Bangunan terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Bapenda Kabupaten Sinjai. *Neraca: Jurnal Ekonomi, Manajemen dan Akuntansi*.

Arisyahidin, Hardianti, A. R., & Arifianto, A. S. (2024). *Application of Financial Technology and Increasing Literacy Finance for MSME Business Strengthening Strategy*. 1619–1626.
https://doi.org/10.2991/978-2-38476-118-0_184

Kamala, J., Salsa, S. A., Nurilawati, & Pangestoeti, W. (2024). *Optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) dalam Meningkatkan Pelayanan Publik*. *Jurnal Ilmiah Ekonomi dan Manajemen*, 3(7), 45–53.
<https://www.ejurnal.kampusakademik.co.id/index.php/jiem/article/view/5782>

Marlina, S., Abdillah, F., Kurniadi, A. R., & Gunadi, W. (2020). Acceptance Of Fintech Lending In Indonesia: The Borrower's Perspective. *Psychology and Education*, 57(9), 1071–1087.
www.psychologyandeducation.net

Montolalu, J. (2017). *Analisis Penerimaan Pendapatan Asli Daerah serta Kontribusinya terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Minahasa Selatan*. *Jurnal Administrasi Bisnis*, 5(3), 10–20.
<https://ejournal.unsrat.ac.id/v3/index.php/jab/article/view/18166>

Putri Darwiyani, A., Ahda Mahira, A., & Maharani, M. (2023). Fenomena Penggunaan QRIS dalam Pembangunan Ekonomi Kreatif Menuju Indonesia Emas 2045. *Prosiding Seminar Nasional Perukaran Mahasiswa Merdeka*, 1(1), 10–18.

Sugiyono. (2016). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. ALFABETA.

Sugiyono. (2022). *Metode Penelitian*

Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D. ALFABETA.